

Ministry of Religious Affairs' Role via Preachers in Strengthening Religious Moderation within a Muslim Community of Diverse Islamic Organizational Affiliations in Ngunut Village

Septian Dwi Cahyo¹, Dzulfikar Akbar Romadlon²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; septianwicahyo65@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; dzulfikarakbar@umsida.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Ministry of Religious Affairs; preacher; religious moderation; Islamic Religious Education;

Received 2026-06-10

Revised 2026-06-12

Accepted 2026-06-20

ABSTRACT

This study analyzes the strategy of the Ministry of Religious Affairs through a field preacher in strengthening religious moderation in Ngunut Village, Karanganyar. The case concerns intra-Muslim diversity represented by Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, and MTA rather than interreligious plurality. A qualitative case-study design combined participant observation, semi-structured interviews, and document analysis. The researcher was positioned as a participant-researcher; therefore, personal field experience was treated as reflective data and corroborated with institutional documents, local religious actors, and community accounts. The findings show that the Ministry's moderation mandate was translated through layered coordination involving the district Ministry office, the Religious Affairs Office, religious counselors, the village government, mosque administrators, and Islamic organizations. The preacher worked across mosques, Qur'anic classes, schools, inter-organizational forums, and social services by adapting language, methods, and roles to different audiences. Religious moderation was sustained through recognition of organizational differences, deliberation, rotating leadership in communal worship, accommodation of differences in subsidiary religious practices, and public-oriented social action. Bil-hal practices of the four organizations—education, charity, hospitality, sacrificial-meat distribution, health services, environmental activities, and an open MSME bazaar—provided shared arenas without erasing organizational identity. From an Islamic Religious Education perspective, the process reflects non-formal value education through teaching, exemplary conduct, habituation, dialogue, and social participation.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dzulfikar Akbar Romadlon

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; dzulfikarakbar@umsida.ac.id.

1. INTRODUCTION

Indonesia memiliki keragaman sosial dan keagamaan yang menjadi modal kehidupan bersama sekaligus menuntut tata kelola perbedaan yang adil. Dalam ruang internal umat Islam, organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, LDII, dan MTA membawa tradisi pendidikan, dakwah, praktik ibadah, serta pelayanan sosial yang berbeda. Keragaman tersebut tidak dengan sendirinya melahirkan konflik, tetapi dapat membentuk jarak apabila komunikasi antarkelompok lemah, identitas organisasi dipertentangkan, atau ruang perjumpaan bersama tidak tersedia (Mardamin, 2021). Oleh karena itu, penguatan jaringan komunikasi antar-takmir masjid dan optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan inklusif menjadi kunci dalam mencegah disintegrasi (Istikomah et al., 2020). Moderasi beragama karena itu tidak cukup dipahami sebagai slogan normatif, tetapi sebagai cara beragama yang adil, berimbang, menolak kekerasan, menghormati martabat manusia, dan mampu mengelola perbedaan dalam kehidupan Bersama. (Mardamin, 2021) (Marbun, 2023) or (Khoiriyah, 2025) or (Beddu, 2023).

Kementerian Agama memegang mandat strategis dalam pengarusutamaan moderasi melalui regulasi, KUA, penyuluh agama, kemitraan dengan pemerintah daerah, dan penugasan aktor dakwah. Kebijakan tersebut baru memperoleh makna ketika diterjemahkan di tingkat lokal: siapa yang memperoleh legitimasi, bagaimana kebutuhan masyarakat dipetakan, bagaimana pesan disesuaikan, serta bagaimana aktor negara berinteraksi dengan struktur sosial yang telah ada. Kajian tentang moderasi sering menekankan kebijakan makro atau keberhasilan sosialisasi, sedangkan proses implementasi pada komunitas Muslim dengan perbedaan afiliasi organisasi masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci (Irama & Zamzami, 2021) or (Sagita, 2023).

Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, menyediakan konteks yang relevan karena dalam satu ruang sosial terdapat komunitas NU, Muhammadiyah, LDII, dan MTA serta status Kampung Moderasi Beragama. Keragaman yang menjadi fokus penelitian bersifat intraumat Islam, bukan pluralitas lintas agama. Data terdahulu menunjukkan adanya donor darah lintas ormas, penanaman bibit kelengkeng, forum takmir, musyawarah pelaksanaan hari raya, dan kegiatan sosial bersama (Pratama & Adnani, 2023). Namun, keberadaan empat ormas dan label Kampung Moderasi tidak otomatis membuktikan moderasi. Bukti substantif harus dicari pada mekanisme konkret: bagaimana perbedaan diakui, bagaimana keputusan bersama dibuat, bagaimana praktik furu'iyah dikelola, bagaimana pelayanan sosial dibuka, dan bagaimana masyarakat meresponsnya.

Dakwah menjadi salah satu jalur implementasi kebijakan tersebut. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, dakwah tidak hanya menyampaikan pesan,

tetapi berfungsi sebagai pendidikan nonformal yang membentuk pengetahuan, sikap, nilai, dan praktik melalui ta'lim, keteladanan, pembiasaan, dialog, serta pengalaman sosial. Dakwah bil lisan memberi penjelasan dan bimbingan, sedangkan dakwah bil hal menghadirkan pesan agama dalam pelayanan, kepedulian, pemberdayaan, dan penyelesaian masalah konkret (Aziz, 2024) or (Munir, 2021) or (Muktarruddin, 2020) or (Mutiawati & Ramadhani, 2023). Model kaderisasi da'i yang efektif menuntut pengintegrasian antara kapasitas keilmuan retorika mimbar (*muhadhoroh*), ketajaman analisis (*munadhoroh*), serta pembekalan *life skills* dan kemandirian sosial agar da'i adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Amanulloh & Romadlon, 2025). Keduanya perlu dibaca secara relasional karena kredibilitas pesan verbal sering bergantung pada kualitas tindakan, sementara kegiatan sosial membutuhkan pemaknaan agar tidak berhenti sebagai aktivitas karitatif.

Posisi akademik penelitian ini dibangun pada tiga kesenjangan. Pertama, kesenjangan implementasi kelembagaan: belum banyak kajian yang menjelaskan bagaimana mandat moderasi Kementerian Agama diterjemahkan melalui da'i dan dinegosiasikan bersama KUA, penyuluh, pemerintah desa, takmir, dan empat ormas. Kedua, kesenjangan mekanisme sosial: kajian terdahulu sering mendeskripsikan harmoni, tetapi belum merinci hubungan antara pemetaan mad'u, adaptasi dakwah, musyawarah, pelayanan sosial, dan respons masyarakat. Ketiga, kesenjangan relasional-edukatif: belum cukup dibedakan antara modal sosial yang telah hidup sebelum intervensi negara dan kontribusi tambahan penugasan da'i, sekaligus bagaimana proses tersebut dapat dibaca sebagai internalisasi nilai PAI nonformal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis strategi Kementerian Agama melalui da'i dalam penguatan moderasi beragama di Desa Ngunut; menjelaskan koordinasi kelembagaan dan adaptasi dakwah; menganalisis integrasi bil lisan dan bil hal; memetakan praktik sosial-keagamaan NU, Muhammadiyah, LDII, dan MTA; serta menjelaskan mekanisme yang menghubungkan tindakan tersebut dengan moderasi beragama dan kohesi sosial. Penelitian tidak menguji klaim bahwa seorang da'i menciptakan kerukunan, tetapi menelaah bagaimana strategi kelembagaan dan praktik lapangan memasuki ekosistem lokal yang telah lebih dahulu terbentuk.

Strategi dakwah merupakan rangkaian keputusan mengenai sasaran, materi, metode, media, waktu, aktor, dan pola interaksi (Aziz, 2024) or (Munir, 2021) or (Salim, 2018). Pada komunitas dengan keragaman afiliasi ormas, strategi perlu diawali pemetaan mad'u yang mempertimbangkan usia, pendidikan, kebiasaan ibadah, posisi sosial, dan sensitivitas organisasi. Pemetaan bukan alat untuk mengotak-ngotakkan warga, melainkan dasar agar pesan proporsional dan resistensi yang tidak diperlukan dapat dihindari (Karim et al., 2021). Dalam penugasan jangka pendek, pemetaan dapat berlangsung melalui konsultasi dengan KUA dan tokoh

lokal, observasi partisipatif, serta umpan balik jamaah; tetapi proses tersebut tidak boleh disebut sistematis apabila tidak terdokumentasi.

Moderasi beragama dalam studi ini dipahami sebagai proses pengelolaan perbedaan, bukan pengaburan akidah atau penghapusan identitas organisasi. Indikator kebijakan berupa komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal digunakan sebagai orientasi umum (Agama, 2019) or (Baida, 2025). Pada komunitas Muslim multi-afiliasi, indikator tersebut diterjemahkan menjadi penghormatan terhadap perbedaan praktik, keterbukaan ruang komunikasi, musyawarah, kerja sama sosial, dan penghindaran delegitimasi kelompok lain. Kohesi sosial digunakan sebagai konsep pelengkap yang terlihat dari kepercayaan, partisipasi, kerja sama, kemampuan mengelola perbedaan, dan kesinambungan hubungan (Maksum et al., 2024). Kerangka analitik penelitian memadukan empat mekanisme. Edukatif berarti dakwah berfungsi sebagai proses belajar dan internalisasi nilai PAI. Adaptif berarti pesan, metode, bahasa, dan peran berubah sesuai mad'u dan arena. Kolaboratif berarti pelaksanaan bergantung pada legitimasi serta pembagian peran antara Kementerian Agama, KUA, pemerintah desa, takmir, ormas, dan lembaga sosial. Integratif berarti dakwah verbal dihubungkan dengan tindakan sosial. Kerangka ini dipakai sebagai perangkat untuk membaca data, bukan teori yang dipaksakan. Kesimpulan hanya dipertahankan ketika ditopang dokumen, observasi, dan keterangan lebih dari satu sumber.

2. METHODS

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami strategi Kementerian Agama melalui da'i di Desa Ngunut selama 18 Februari-20 Maret 2026. Unit kasus meliputi penerjemahan mandat kelembagaan, koordinasi, kegiatan dakwah, interaksi dengan empat ormas, pelayanan sosial, dan respons masyarakat. Studi kasus dipilih karena pertanyaan penelitian berorientasi pada proses dan mekanisme dalam konteks yang batasnya terkait erat dengan struktur sosial lokal.

Peneliti berposisi sebagai peneliti-partisipan yang terlibat langsung dalam kegiatan. Posisi ini memberikan akses terhadap pertemuan, masjid, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial, tetapi berpotensi menimbulkan bias penilaian. Karena itu, pengalaman peneliti diperlakukan sebagai catatan reflektif, bukan bukti tunggal. Klaim utama dikorroborasi melalui dokumen program, foto atau video, wawancara dengan KUA dan penyuluh, tokoh NU, Muhammadiyah, LDII, dan MTA, pengurus masjid, serta masyarakat. Transkrip penelitian Pratama tahun 2023 digunakan sebagai data sekunder untuk membaca kondisi sebelum penugasan dan tidak dihitung sebagai informan primer penelitian ini (Pratama & Adnani, 2023).

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dalam program, pengetahuan mengenai relasi sosial-keagamaan desa, serta kemampuan memberikan perspektif yang berbeda. Data primer yang telah digunakan mencakup keterangan Kepala KUA Jumentono, penyuluh agama, tokoh atau pengurus ormas, dan dialog dengan warga yang mengikuti atau menyaksikan kegiatan. Data sekunder mencakup laporan penugasan, dokumen Kampung Moderasi Beragama, transkrip penelitian terdahulu, dan dokumentasi kegiatan (Pratama & Adnani, 2023), (Cahyo, S. D, 2026), (Jateng Kemenag, 2026). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara merekonstruksi kronologi, alasan keputusan, pengalaman penerimaan, praktik bil hal, dan perubahan yang dirasakan. Observasi digunakan untuk membaca adaptasi bahasa dan peran da'i serta pola interaksi di masjid, TPQ, sekolah, forum takmir, dan kegiatan sosial. Dokumentasi memeriksa tanggal, lokasi, jenis kegiatan, mitra, peran aktor, dan jumlah peserta. Angka partisipan pada kegiatan masjid diperlakukan sebagai estimasi ketika tidak didukung daftar hadir.

Analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian matriks, pembentukan tema, dan verifikasi Kesimpulan (Arioen et al., 2023). Kode awal meliputi mandat kelembagaan, legitimasi, pemetaan mad'u, adaptasi, bil lisan, bil hal, pengelolaan furu'iyah, musyawarah, partisipasi, dan respons kritis. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode, member checking, pencarian kasus negatif, serta pembedaan antara fakta terdokumentasi, persepsi informan, dan interpretasi peneliti.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1 Findings (Temuan)

Desa Ngunut memiliki ekosistem sosial-keagamaan yang dibentuk oleh keberadaan NU, Muhammadiyah, LDII, dan MTA, pemerintah desa, KUA, penyuluh agama, takmir, dan lembaga sosial. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa kerukunan dan komunikasi antarafiliasi telah ada sebelum penugasan da'i tahun 2026. H. Budi Wahyono menjelaskan bahwa masyarakat telah lama terbiasa hidup berdampingan tanpa perselisihan berarti. Melalui P2A, para takmir dikumpulkan menjelang hari raya untuk membicarakan waktu pelaksanaan, penggunaan lapangan, dan pergiliran imam (Pratama & Adnani, 2023). Kepala desa juga menilai tidak terdapat kesenjangan sosial-keagamaan terbuka dan bahwa fasilitas desa dapat digunakan secara adil ketika waktu hari raya berbeda.

Kondisi tersebut penting untuk membatasi klaim penelitian. Kementerian Agama tidak memasuki ruang yang sebelumnya kosong atau konfliktual. Strategi melalui da'i bekerja di atas modal sosial yang telah tersedia berupa kebiasaan bertetangga, forum takmir, kepemimpinan desa, dan kegiatan bersama. Kontribusi negara lebih tepat

dibaca sebagai penguatan, perluasan ruang interaksi, dan penambahan dukungan kelembagaan. Status Kampung Moderasi Beragama memberi bingkai kebijakan, tetapi praktik sehari-hari musyawarah, pergiliran imam, penerimaan terhadap tamu, dan kegiatan sosial menjadi bukti substantifnya.

Koordinasi penugasan berlangsung berjenjang dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, KUA Kecamatan Jumantono, hingga pemerintah desa dan takmir. Setelah lokasi awal mengalami ketidaksinkronan program, dilakukan penyesuaian penempatan dan Desa Ngunut menjadi pusat pembinaan berdasarkan koordinasi serta perubahan surat tugas (Cahyo, S. D, 2026). Peristiwa ini menunjukkan bahwa legitimasi administratif saja tidak cukup; akses lapangan bergantung pada kesiapan lokasi, komunikasi dengan penyuluh, pengetahuan tentang relasi antarormas, dan penerimaan tokoh lokal. Dalam koordinasi awal, Kepala KUA menanyakan afiliasi organisasi da'i untuk mengantisipasi perbedaan amaliah selama Ramadan. Pertanyaan tersebut tidak diarahkan untuk membatasi ruang dakwah, melainkan untuk memetakan lingkungan yang memungkinkan da'i bekerja dengan tenang. Da'i berlatar Muhammadiyah, tetapi ditempatkan sebagai pelaksana mandat Kementerian Agama, bukan utusan organisasi. Posisi ini memungkinkan KUA menjelaskan karakter masjid dan jamaah sekaligus mencegah penugasan dibaca sebagai ekspansi kelompok tertentu. Dengan demikian, infrastruktur moderasi terdiri atas dua lapis. Lapis pertama adalah kelembagaan formal berupa Kementerian Agama, KUA, pemerintah desa, surat tugas, dan status Kampung Moderasi. Lapis kedua adalah infrastruktur relasional berupa kepercayaan, forum takmir, pengetahuan antartokoh, serta kemampuan membagi ruang dan peran. Strategi menjadi efektif ketika kedua lapis tersebut saling menguatkan. Pendekatan ini sejalan dengan penggunaan analisis peta kondisi objektif dan kekuatan kelembagaan lokal (SWOT) untuk merumuskan strategi dakwah yang mampu mengoptimalkan ruang perjumpaan serta meminimalisir potensi ancaman gesekan antar-jamaah (Istikomah et al., 2020).

Integrasi Dakwah Bil Lisan dan Bil Hal

Integrasi bil lisan dan bil hal terlihat ketika pembinaan verbal dihubungkan dengan pelayanan sosial. Dalam peresmian Bedah Rumah bagi Bapak Warno di Desa Gemantar, peran da'i bersifat partisipatif: mengikuti koordinasi, hadir dalam prosesi, berinteraksi dengan penerima dan masyarakat, serta mendokumentasikan kegiatan. Program diinisiasi oleh BAZNAS dan melibatkan Kementerian Agama, KUA, serta pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu, da'i tidak diklaim sebagai penggagas atau penyandang dana, melainkan bagian dari jejaring pelayanan sosial-keagamaan (Cahyo, S. D, 2026).

Pada bakti sosial sembako di KUA Jumantono, da'i membantu pelaksanaan dan penyaluran kepada warga kurang mampu. Sumber dana berasal dari urunan pegawai KUA dengan dukungan beras dari BAZNAS. Laporan menyebut kegiatan melibatkan sekitar 40 orang dewasa, tetapi angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai orang yang terlibat atau hadir, bukan secara otomatis jumlah penerima manfaat. Kejelasan peran dan kategori angka diperlukan agar kegiatan institusional tidak diubah menjadi klaim pencapaian individual.

Keterlibatan sosial memperluas bentuk kehadiran da'i dari ceramah menuju pelayanan. Secara edukatif, tindakan tersebut menghubungkan materi tentang zakat, sedekah, ta'awun, dan tanggung jawab sosial dengan pengalaman konkret. Secara kelembagaan, kegiatan mempertemukan aktor negara, lembaga zakat, dan masyarakat. Namun, data belum membuktikan bahwa satu kegiatan sosial meningkatkan kepercayaan atau mengubah sikap secara permanen. Klaim yang dapat dipertahankan adalah bahwa bil hal menyediakan ruang interaksi dan memperkuat konsistensi antara pesan dan tindakan. Temuan ini menegaskan bahwa dakwah sosial tidak identik dengan kepemilikan program. Integrasi justru tampak pada kemampuan da'i masuk ke dalam program yang telah dirancang lembaga lain, menjalankan peran secara proporsional, dan memberi makna pendidikan agama pada pelayanan. Prinsip ini menjaga akurasi analisis sekaligus memperlihatkan strategi Kementerian Agama sebagai kerja jaringan, bukan kinerja personal seorang aktor.

Praktik Bil Hal Empat Ormas dan Respons Masyarakat

Praktik bil hal di Desa Ngunut tidak hanya muncul dalam penugasan da'i, tetapi telah dijalankan oleh aktor lokal. Muhammadiyah mengembangkan majelis taklim, pendidikan melalui KB/TK Aisyiyah dan MTs Muhammadiyah, santunan, paket sembako, serta ambulans melalui LAZISMU. NU mengelola yasinan, tahlilan, majelis taklim, TPQ, organisasi perempuan dan pemuda, kerja bakti, santunan yatim-dhuafa, bantuan musibah, serta gotong royong. Kedua organisasi memiliki program kelembagaan yang relatif mudah diidentifikasi dan sebagian manfaatnya terbuka bagi warga umum.

Praktik LDII terlihat pada keterlibatan dalam donor darah, penanaman pohon, forum takmir, koordinasi hari raya, keramahtamahan kepada da'i, pengajian rutin, pembagian daging kurban, dan bazar UMKM. Keterbukaan dan partisipasi sosial warga LDII di tingkat lokal ini tidak terlepas dari pola kaderisasi mubaligh mereka yang secara internal menekankan penanaman karakter luhur (seperti rukun, kompak, dan kerja sama yang baik) serta prinsip kemandirian social (Aly & Romadlon, 2024). Menurut Roidah Jannah, pengajian LDII di Desa Ngunut dilakukan sekitar dua

sampai tiga kali setiap bulan. Penyembelihan kurban dilaksanakan di masjid masing-masing dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat serta tokoh, baik yang berafiliasi dengan LDII maupun yang tidak. Bazar UMKM produk warga LDII dilaksanakan sekali setahun dan terbuka untuk semua warga (wawancara, 16 Juli 2026). Data ini memperluas bukti bil hal LDII dari partisipasi dalam agenda bersama menuju pelayanan sosial dan ekonomi yang melampaui batas keanggotaan.

Unsur MTA berpartisipasi dalam donor darah, penanaman 40 bibit kelengkeng, sosialisasi PKK, dan bakti sosial kepada dhuafa melalui kerja sama dengan BMT. Suparna sebagai tokoh MTA sekaligus Ketua Kampung Moderasi Beragama berfungsi sebagai penghubung antarkelompok. Ia menekankan bahwa urusan internal keagamaan dapat dikelola masing-masing, sedangkan persoalan sosial dikerjakan bersama (Pratama & Adnani, 2023). Karena kegiatan tersebut merupakan program Kampung Moderasi yang melibatkan banyak unsur, kontribusi MTA dipahami sebagai partisipasi, fasilitasi komunikasi, dan kerja sama, bukan kepemilikan eksklusif program.

Respons masyarakat tampak dalam partisipasi, keterbukaan layanan, undangan lintas kelompok, dan penerimaan personal. Da'i berlatar Muhammadiyah memperoleh tempat tinggal dan konsumsi selama tiga hari dari pondok yang berafiliasi dengan NU serta penginapan gratis dari warga LDII. Tindakan tersebut menjadi bukti mikro-sosial bahwa perbedaan organisasi tidak menghalangi penghormatan kepada tamu. Kepala desa memaknai kegiatan Kampung Moderasi sebagai penguatan toleransi, perlindungan yang adil, dan kenyamanan beribadah. Darwanto dari NU menilai kegiatan bersama membuat tokoh ormas lebih saling mengenal dan membuka peluang kerja sama. Respons kritis juga muncul. H. Ngisom dari Muhammadiyah menilai donor darah dan penanaman pohon sebagai kegiatan baik, tetapi dampak komunikasi lebih terasa pada tingkat pimpinan daripada akar rumput (Pratama & Adnani, 2023). Temuan ini mencegah gambaran yang terlalu ideal. Keterbukaan program dan interaksi antartokoh telah terbukti, tetapi pemerataan dampak membutuhkan keterlibatan warga, pemuda, dan perempuan secara berulang.

Table 1. Arena, Peran Da'i, dan Fungsi Moderasi

Arena	Praktik utama	Peran da'i	Mitra	Fungsi analitik
Masjid dan tarling	Imamah, kultum, kajian, khotbah	Imam, penceramah, fasilitator dialog	Takmir, pemerintah desa, penyuluh	Adaptasi terhadap jamaah dan perluasan ruang pertemuan

TPQ dan sekolah	Pengajaran Iqra dan seminar akhlak	Pendidik dan narasumber	Pengelola TPQ/MI, sekolah, KUA	Internalisasi nilai melalui materi sesuai tahap perkembangan
Forum lintas ormas	Musyawahar imam/khatib dan hari raya	Peserta dan komunikator	NU, Muhammadiyah, LDII, MTA, pemerintah desa	Pengelolaan perbedaan melalui musyawarah dan pembagian peran
Pelayanan sosial	Bedah rumah dan baksos sembako	Pendamping, relawan, dokumentator	KUA, BAZNAS, Kemenag, masyarakat	Menghubungkan pesan kepedulian dengan tindakan nyata

Table 2. Ringkasan Praktik Bil Hal Empat Ormas

Ormas	Praktik terverifikasi	Keterbukaan sasaran	Nilai PAI/kontribusi moderasi
Muhammadiyah	Pendidikan Aisyiyah/Muhammadiyah, santunan, sembako, ambulans, forum takmir	Jamaah, peserta didik, dhuafa, warga yang membutuhkan layanan	Ta'awun, pendidikan, kemaslahatan, komunikasi lintas takmir
NU	TPQ, majelis taklim, kerja bakti, santunan, bantuan musibah, pelayanan kepada tamu	Anggota dan masyarakat umum sesuai jenis kegiatan	Ukhuwah, gotong royong, tasamuh, penghormatan kepada tamu
LDII	Forum takmir, kurban terbuka, bazar UMKM, donor darah, penghijauan, penginapan da'i	Daging kurban dan bazar terbuka bagi warga di luar LDII	Keterbukaan, ta'awun, interaksi ekonomi dan sosial lintas afiliasi
MTA	Donor darah, bibit kelengkeng, sosialisasi PKK, baksos bersama	Jamaah dan warga lintas kelompok	Fasilitasi komunikasi, kemaslahatan, partisipasi pada agenda bersama

3.2 Discussion (Diskusi)

Laporan kegiatan mencatat pembinaan pada 14 masjid atau musala, 38 pertemuan kajian rutin, dua khotbah Jumat, pembinaan pada TPQ dan lembaga pendidikan, dua kegiatan sosial utama, serta satu konsolidasi lintas ormas menjelang Idulfitri (Cahyo, S. D, 2026). Data kuantitatif tersebut tidak dipakai sebagai bukti perubahan sikap, tetapi menunjukkan keluasan arena dan variasi peran. Da'i berfungsi sebagai imam, penceramah, pengajar, narasumber sekolah, peserta musyawarah, pendamping kegiatan sosial, dan penghubung dengan takmir.

Adaptasi tampak pada perbedaan pendekatan terhadap sasaran. Pada siswa SMKN Jumantono, pesan akhlak disampaikan dengan bahasa komunikatif, gerak lebih dinamis, serta contoh yang berkaitan dengan pergaulan, media sosial, integritas, dan dunia kerja. Fleksibilitas penyampaian ini mencerminkan kompetensi komunikasi da'i yang mampu menyelaraskan pesan-pesan agama bernuansa *rahmatan lil 'alamin* dengan konteks dan tingkat perkembangan audiens (Amanulloh & Romadlon, 2025). Pada jamaah lanjut usia dalam kajian menjelang berbuka, bahasa dibuat lebih sederhana, tempo lebih tenang, dan contoh dikaitkan dengan ibadah harian, keluarga, bertetangga, serta amal sosial. Pada anak TPQ, peran beralih menjadi pengajar Iqra. Pemetaan mad'u dengan demikian diwujudkan dalam perubahan bahasa, durasi, contoh, dan bentuk interaksi, bukan sekadar klasifikasi audiens.

Adaptasi juga muncul ketika da'i berhadapan dengan perbedaan *furu'iyah*. Selama berada di lingkungan NU, da'i mengikuti tarawih 23 rakaat dan mengajar pada lembaga diniyah yang berafiliasi dengan NU. Tindakan tersebut tidak dimaknai sebagai perubahan identitas, tetapi penghormatan terhadap praktik yang memiliki dasar fikih. Strategi yang dipakai bukan menghindari seluruh perbedaan, melainkan membedakan persoalan prinsip dan cabang, tidak menjadikan khilafiah sebagai bahan polemik, serta mengikuti tata tertib lembaga tempat bertugas. Tarawih keliling yang digagas pemerintah desa memperluas mobilitas dakwah lintas afiliasi. Pengisi kegiatan dapat memasuki masjid yang karakter jamaahnya berbeda, sehingga masjid pada agenda tertentu berfungsi sebagai ruang pertemuan. Mobilitas ini memperkuat temuan bahwa dakwah moderasi tidak cukup dilaksanakan melalui materi khusus tentang toleransi. Moderasi dipraktikkan ketika da'i mau mendengar, menyesuaikan diri, menerima aturan lokal, dan tetap menyampaikan nilai bersama tanpa memaksakan identitas organisasi.

Dari perspektif PAI, proses tersebut bersifat edukatif karena masyarakat belajar melalui pesan sekaligus contoh perilaku. Nilai tasamuh, ukhuwah, adab kepada tuan rumah, dan tanggung jawab sosial tidak hanya didefinisikan, tetapi ditampilkan dalam cara da'i berkomunikasi dan berpartisipasi. Integritas dan keteladanan akhlak da'i merupakan fondasi utama agar komunikasi dakwah dapat diterima secara terbuka oleh komunitas dengan latar belakang doktrin yang beragam (Aly & Romadlon, 2024). Namun, bukti yang tersedia terutama menunjukkan proses dan penerimaan awal; perubahan pemahaman jamaah secara individual masih memerlukan data wawancara yang lebih luas.

Mekanisme Moderasi, Nilai PAI, dan Model Temuan

Rangkaian data menunjukkan bahwa moderasi di Desa Ngunut bekerja melalui lima mekanisme. Pertama, identitas NU, Muhammadiyah, LDII, dan MTA diakui tanpa tuntutan melebur menjadi identitas baru. Kedua, komunikasi dipelihara melalui KUA, penyuluh, pemerintah desa, P2A, paguyuban takmir, dan tokoh ormas. Ketiga, perbedaan praktik dikelola melalui musyawarah, pergiliran imam, pembagian fasilitas, serta penghormatan terhadap *furu'iyah*. Keempat, kegiatan sosial menyediakan ruang perjumpaan di luar forum doktrinal. Kelima, institusi lokal memberikan legitimasi dan kesinambungan.

Pelaksanaan salat Id menjadi contoh penting. Ketika penetapan hari raya sama, masyarakat dapat melaksanakan salat bersama dan imam atau khatib dijadwalkan bergiliran. Ketika waktu berbeda, pemerintah desa memberikan fasilitas kepada masing-masing kelompok. Keadilan dalam konteks ini bukan penyeragaman keputusan keagamaan, melainkan pemberian hak dan ruang yang proporsional. Da'i Kementerian Agama mengikuti mekanisme tersebut sebagai peserta dan komunikator, bukan penentu tunggal.

Kegiatan donor darah, penanaman pohon, pembagian kurban, bazar UMKM, santunan, ambulans, kerja bakti, dan bantuan sosial memperlihatkan kemaslahatan sebagai titik temu. Masing-masing kelompok mempertahankan pembinaan internal, tetapi dapat bekerja sama pada persoalan kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan kemanusiaan. Dalam perspektif PAI, nilai ukhuwah, tasamuh, ta'awun, musyawarah, keadilan, keteladanan, dan tanggung jawab sosial diinternalisasikan melalui pengalaman, bukan hanya ceramah (Pribadi & Makmur, 2025).

Faktor pendukung utama ialah modal kerukunan yang telah ada, keberadaan tokoh dan pusat kegiatan empat ormas, dukungan kepala desa dan penyuluh, forum komunikasi, serta kemitraan KUA-BAZNAS. Faktor penghambatnya meliputi ketidaksinkronan penempatan awal, pra-survei yang terbatas, durasi program singkat, data peserta yang sebagian berupa estimasi, ketimpangan kedalaman data antarormas, dan dampak yang belum merata pada akar rumput. Kritik tersebut menunjukkan bahwa jumlah kegiatan tidak dapat dipakai sebagai pengganti evaluasi hasil sosial.

Sintesis temuan menghasilkan model edukatif-adaptif-kolaboratif-integratif. Edukatif tampak pada pengajaran dan keteladanan; adaptif pada perubahan bahasa, metode, dan sikap terhadap *furu'iyah*; kolaboratif pada legitimasi dan jaringan kelembagaan; integratif pada hubungan antara pesan verbal dan pelayanan sosial.

Model ini bukan formula kausal yang menjamin perubahan jangka panjang, melainkan penjelasan proses mengenai cara Kementerian Agama memperkuat ekologi moderasi yang telah ada.

Table 3. Model Strategi Kementerian Agama melalui Da'i

Mekanisme	Bukti utama	Kontribusi yang dapat diklaim	Batas klaim
Edukatif	Kajian, TPQ, seminar, keteladanan dan dialog	Menyediakan ruang belajar dan internalisasi nilai PAI	Belum mengukur perubahan pemahaman individual secara longitudinal
Adaptif	Penyesuaian bahasa, arena, peran, dan praktik furu'iyah	Mengurangi resistensi dan menjaga penerimaan lintas jamaah	Sebagian bukti bersumber dari refleksi peneliti
Kolaboratif	Koordinasi Kemenag-KUA-desa-takmir-ormas-BAZNAS	Membuka akses, legitimasi, sumber daya, dan forum komunikasi	Kolaborasi masih lebih kuat pada tingkat tokoh
Integratif	Ceramah, pendidikan, baksos, bedah rumah, kurban, bazar	Menghubungkan pesan agama dengan pelayanan sosial	Belum membuktikan dampak kausal jangka panjang

4. CONCLUSION

Strategi Kementerian Agama melalui da'i di Desa Ngunut berlangsung dalam ekosistem komunitas Muslim dengan keragaman afiliasi NU, Muhammadiyah, LDII, dan MTA. Moderasi beragama tidak dibentuk dari keadaan yang sebelumnya konfliktual, karena masyarakat telah memiliki kebiasaan hidup berdampingan, forum takmir, musyawarah hari raya, dan kegiatan sosial bersama. Kontribusi Kementerian Agama lebih tepat dipahami sebagai penguatan melalui legitimasi, pemetaan, dakwah multi-arena, partisipasi pada forum lintas ormas, serta integrasi pembinaan verbal dengan pelayanan sosial. Strategi tersebut bekerja secara edukatif, adaptif, kolaboratif, dan integratif.

Moderasi terjadi ketika identitas kelompok diakui, komunikasi tersedia, perbedaan furu'iyah dikelola tanpa pemaksaan, peran ibadah dibagi melalui musyawarah, dan kegiatan sosial dibuka bagi kepentingan publik. Praktik bil hal empat ormas—pendidikan, santunan, gotong royong, keramah-tamahan, kurban terbuka, ambulans, penghijauan, dan bazar UMKM—menjadi ruang pengalaman bersama yang menginternalisasikan nilai ukhuwah, tasamuh, ta'awun, keadilan,

keteladanan, dan kemaslahatan. Kohesi sosial tidak dapat diklaim sebagai hasil satu aktor atau program singkat. Data mendukung adanya ruang komunikasi, penerimaan personal, dan kolaborasi programatik, tetapi dampak pada akar rumput dan perubahan sikap jangka panjang belum dapat dipastikan. Karena itu, kekuatan penelitian terletak pada penjelasan proses dan mekanisme, bukan pada klaim kausal bahwa penugasan da'i telah menciptakan moderasi secara permanen.

Implikasi dan Rekomendasi

Secara kelembagaan, Kementerian Agama perlu memperkuat pra-survei, sinkronisasi lokasi, dan pembekalan komunikasi lintas afiliasi. Penugasan da'i sebaiknya didampingi penghubung lokal dari KUA atau penyuluh serta dilengkapi indikator yang membedakan keluaran kegiatan (seperti jumlah kajian dan lokasi) dari hasil sosial berupa partisipasi, komunikasi, dan keberlanjutan kerja sama. Sistem pelaporan perlu mencatat peran aktor, kategori peserta, respons kritis, dan tindak lanjut program. Bagi KUA, pemerintah desa, takmir, dan empat ormas, forum yang telah ada perlu diarahkan dari pola saling mengundang menuju perencanaan bersama. Donor darah, kurban, bazar UMKM, layanan ambulans, penghijauan, bantuan musibah, dan pendidikan remaja dapat menjadi kalender kolaboratif yang melibatkan warga di luar elite organisasi. Urusan internal masing-masing kelompok tetap dihormati, sementara pelayanan publik dikembangkan sebagai titik temu. Bagi pengembangan PAI, temuan menegaskan pentingnya pendidikan agama berbasis pengalaman masyarakat. Kompetensi pendidik dan da'i perlu mencakup pemetaan sosial, komunikasi lintas kelompok, pengelolaan perbedaan *furu'iyyah*, fasilitasi musyawarah, dan pelayanan sosial. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan desain longitudinal serta melibatkan lebih banyak warga biasa, perempuan, pemuda, dan penerima manfaat agar perubahan pada tingkat akar rumput dapat diuji secara lebih kuat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, durasi pengamatan mengikuti penugasan selama Ramadan sehingga memadai untuk membaca proses dan respons awal, tetapi belum cukup untuk menilai perubahan jangka panjang. Kedua, posisi peneliti sebagai partisipan memberi akses kuat sekaligus risiko subjektivitas; triangulasi telah dilakukan, tetapi tidak menghapus seluruh bias reflektif. Ketiga, komposisi data belum seimbang: perspektif tokoh dan pejabat lebih dominan daripada warga akar rumput, sedangkan kedalaman informasi program mandiri setiap ormas berbeda. Temuan karena itu harus dibaca sebagai penjelasan

kontekstual mengenai mekanisme penguatan moderasi, bukan generalisasi untuk semua desa atau bukti kausal permanen.

REFERENCES

- Agama, R. I. K. (2019). Moderasi beragama kemenag RI. In *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*
- Aly, I., & Romadlon, D. A. (2024). The Strategy for Mubaligh Cadre Development by LDII at Nurul Hakim Kaliawen Islamic Boarding School in Kediri [Strategi Kaderisasi Mubaligh LDII Di Pondok *MODELING: Jurnal Program Studi* <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2493>
- Amanulloh, H. F., & Romadlon, D. A. (2025). Da'i Cadre Development Strategies at Al Fattah Islamic Boarding School: Strategi Pengembangan Kader Dakwah di Sekolah Asrama Islam Al Fattah. In *Academia Open*. acopen.umsida.ac.id. <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/12683>
- Arioen, R., Ahmaludin, A., Junaidi, J., Indriyani, I., & ... (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian. In *Purbalingga: Eureka Media*
- Aziz, M. A. (2024). *Ilmu Dakwah edisi revisi*. [books.google.com](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=75gFEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ilmu+dakwah&ots=I57b9XudAd&sig=AcsIPJKTGLJkrfBZPIjVrrWmIhU). <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=75gFEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ilmu+dakwah&ots=I57b9XudAd&sig=AcsIPJKTGLJkrfBZPIjVrrWmIhU>
- Baida, F. (2025). *IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI DESA RAMA AGUNG PERSPEKTIF* repository.uinfasbengkulu.ac.id. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6073>
- Beddu, M. J. (2023). Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial. *Addayyan*. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/176>
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal* <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/kaca/article/view/10>
- Istikomah, I., Romadlon, D. A., & Hariyanto, B. (2020). Strategi Dakwah Muhammadiyah Melalui FKMMMS (Forum Komunikasi Masjid Muhammadiyah Sidoarjo). In *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* (Vol. 14, Number 1, pp. 111–124). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.3341>

- Karim, A., Adeni, A., Fitri, F., Fitri, A. N., Hilmi, M., Fabriar, S. R., & Rachmawati, F. (2021). Pemetaan untuk Strategi Dakwah di Kota Semarang Menggunakan Pendekatan Data Mining (Mapping for Da'wah Strategy in Semarang City Using Data Mining Approach). In *Jurnal Dakwah Risalah* (Vol. 32, Number 1, p. 40). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://doi.org/10.24014/jdr.v32i1.12549>
- Khoiriyah, K. (2025). The religious study gathering model of Maiyah Cahyo Sumebar as a form of inclusive communication in building religious harmony in Sukoharjo. *Islamic Communication Journal*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/icj/article/view/25482>
- Maksum, M., Priamono, G. H., & ... (2024). Moderasi Beragama Sebagai Katalisator Untuk Kohesi Sosial Di Desa Puntukdoro Magetan: Religious Moderation as a Catalyst for Social Cohesion in Puntukdoro *Journal of* <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jcd/article/view/6441>
- Marbun, S. (2023). Membangun dunia yang berani: Menegakkan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <http://journal.uwks.ac.id/juispol/article/view/2897>
- Mardamin, K. K. M. Z. A. E. P. A. (2021). KEPEMIMPINAN LOKAL, MODERASI BERAGAMA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PURWAKARTA. *Penamas*, (Vol 34 No 2 (2021): Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021), 221–242. <https://penamas.kemenag.go.id/index.php/penamas/article/view/511/214>
- Muktarruddin, M. (2020). Dakwah Bi Al-Hal di Indonesia: Problem dan Solusi. In *An Nadwah* (Vol. 25, Number 1, p. 29). Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. <https://doi.org/10.37064/nadwah.v25i1.7479>
- Munir, M. (2021). *Manajemen dakwah*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xRRNEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=manajemen+dakwah&ots=n2zgNT1IQ8&sig=xU_LX8MS8MpionCB3ki mhHbT6go
- Mutiawati, M., & Ramadhani, S. (2023). Efektivitas Dakwah Bil-Hal sebagai Solusi Penyampaian Pesan Dakwah kepada Mitra Dakwah. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal* <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/komunika/article/view/16950>
- Pratama, S. D., & Adnani, K. (2023). STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN MODERASI BERAGAMA DI DESA NGUNUT JUMANTONO KARANGANYAR. UIN Surakarta.

- Pribadi, I., & Makmur, M. (2025). Peranan Penyuluh Agama Islam Terhadap Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama. *Tamaddun*. <https://journal.umg.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/9604>
- Sagita, A. A. (2023). *METODE DAKWAH POS DA'I (PERSAUDARAAN DA'I INDONESIA) DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH BERBASIS MASYARAKAT PADA DAERAH* repository.uin-suska.ac.id. [https://repository.uin-suska.ac.id/71557/1/SKIRIPSI GABUNGAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/71557/1/SKIRIPSI%20GABUNGAN.pdf)
- Salim, A. (2018). PERAN DAN FUNGSI DAI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAKWAH. In *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* (Vol. 8, Number 1). IAIN Langsa. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v8i1.401>
- Cahyo, S. D. (2026). Laporan akhir penugasan da'i Kementerian Agama di Kecamatan Jumantono tahun 2026. Dokumen program tidak diterbitkan.